I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian sebagai sumber matapencaharian dari mayoritas penduduknya. Artinya sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Dimana penggunaan lahan diwilayah Indonesia sebagian besar diperuntukkan sebagai lahan pertanian (Husodo, 2004).

Kecilnya luasan lahan pertanian yang dimiliki oleh petani menjadi salah satu faktor masih tertinggalnya sektor pertanian Indonesia dibanding negara maju. Meningkatkan luasan lahan, upaya yang dapat dilakukan adalah tidak memperbanyak jumlah petani tetapi memaksimalkan petani yang ada, selama ini banyak pihak beranggapan memperbanyak jumlah petani dengan regenerasi dapat meningkatkan sektor pertanian namun situasi tersebut justru memperkecil luas lahan pertanian yang ada (Siregar, 2019).

Rata-rata petani di Indonesia memiliki lahan 0,3 hektar per petani khususnya di Pulau Jawa. Jika satu petani memiliki anak dua sampai tiga orang, dan semuanya memilih menjadi petani, maka luas lahan pertanian yang dimiliki petani semakin berkurang dengan adanya pembagian warisan.

Pesatnya industrialisasi dan pertambahan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya konversi atau alih guna lahan sawah secara cepat. Sayangnya konversi lahan sawah tidak dapat dikembalikan setelah menjadi perumahan dan kawasan industri, sehingga proses ini cenderung membawa kemorosotan kualitas lingkungan. Lahan sawah dan kebun sering mengalami pemecahan sebagai fragmentasi, sejalan dengan adanya proses waris kepada anak, secara turun temurun (Mubyarto, 1995)

Potensi sosial ekonomi yang merupakan kekuatan sekaligus modal dasar bagi pengembangan produksi padi di Indonesia antara lain adalah: (i) beras merupakan bahan pangan pokok bagi 95 persen penduduk Indonesia, (ii) usahatani padi sudah merupakan bagian hidup dari petani di Indonesia

sehingga menciptakan lapangan kerja yang besar, dan (iii) kontribusi dari usahatani padi terhadap pendapatan rumah tangga petani cukup besar.

Permasalahan yang dihadapi petani pada umumnya adalah lemah dalam hal permodalan. Akibatnya tingkat penggunaan saprodi rendah, inefisien skala usaha karena umumnya berlahan sempit, dan karena terdesak masalah keuangan posisi tawar-menawar ketika panen lemah. Selain itu produk yang dihasilkan petani relatif berkualitas rendah, karena umumnya budaya petani di pedesaan dalam melakukan praktek pertanian masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga (subsisten), dan belum berorientasi pasar. Selain masalah internal petani tersebut, ketersediaan faktor pendukung seperti infrastruktur, lembaga ekonomi pedesaan, intensitas penyuluhan, dan kebijakan pemerintah sangat diperlukan, guna mendorong usahatani dan meningkatkan akses petani terhadap pasar. Meskipun tidak bisa berbasis teknologi tinggi, tetapi landasan sektor pertanian yang kokoh diperlukan dalam memacu pertumbuhan perekonomian pedesaan. Pemacuan perekonomian pedesaan lambat laun bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di desa. Berdasarkan permasalahan dan pemahaman kondisi eksternal petani yang demikian, maka dari beberapa model usahatani, *Corporate Farming* dapat digunakan sebagai alternatif untuk meminimasi kelemahan yang dihadapi petani padi dan palawija.

Kendala keterbatasan modal dapat diatasi melalui kemitraan kerja. Pencapaian target efisiensi usahatani dapat dilakukan melalui keterpaduan kegiatan penyediaan saprodi, pola tanam yang serentak, keseragaman teknologi, pasca panen terpadu, dan pemasaran yang terorganisasi. Hak pribadi masing-masing petani atas kepemilikan lahan tidak terusik tanpa adanya konsolidasi lahan. *Corporate Farming* secara langsung telah memberdayakan lembaga tani yang ada, yaitu kelompok tani, mengembangkan kualitas SDM melalui penyuluhan tentang pentingnya kemitraan, kesepakatan, dan kebersamaan. Selain itu, jalinan kerjasama

yang terintegrasi secara vertikal dan horisontal dengan pihak swasta dan fasilitator pemerintah telah mampu mengurangi cara-cara koordinasi yang bersifat *top-down* dan sentralistik. Pola *top-down* dan sentralistik masih tercermin dalam model *Corporate Farming*. Sementara dengan *Corporate Farming* pemerintah memfasilitasi petani dengan pemberdayaan secara *bottom-up* dan terdesentralisasi, sehingga lebih mengenai sasaran utama, yaitu mengembangkan kualitas SDM petani. Petani akan secara aktif terlibat di setiap kegiatan dan mempunyai *sense of belonging* yang tinggi akan keberhasilan usaha kelompoknya karena organisasi tersebut beranggotakan petani sendiri, dikelola oleh petani sendiri, dan keberhasilannya akan diambil manfaatnya untuk petani sendiri. Tujuan akhirnya rantai pemasaran menjadi pendek dah lebih efisien, sehingga petani dapat memperoleh harga yang sesuai dan meningkat pendapatannya (Nuryanti, 2005)

Corporate farming adalah kegiatan penggabungan lahan usaha tani untuk dikelola secara bersama-sama oleh para petani dan terpadu di dalam satu manajemen. Sistem ini dapat dijadikan sebagai suatu solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi petani saat ini. Efisiensi usaha, standarisasi mutu, dan efektivitas serta efisiensi manajemen pemanfaatan sumber daya merupakan hal yang diharapkan akan tercapai saat sistem *Corporate Farming* diterapkan.

Bisnis *Corporate Farming* didefinisikan oleh tiga standar utama yang harus dipenuhi yaitu; dimiliki oleh anggotanya, mereka yang berpartisipasi dalam bisnis, bukan oleh pemegang saham luar atau investor. Setiap anggota bisnis memiliki suara dalam keputusan bisnis utama dan dalam memilih perwakilan atau petugas. Keuntungan anggota, bukan keuntungan untuk luar pemegang saham. Setiap laba didistribusikan secara adil di antara anggota (Gilbert, 2014).

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah sebesar 318.580 Ha dan terdiri dari 5 Kabupaten/Kota merupakan daerah dengan sturktur geografi dan kultur sosial ekonomi masyarakat yang berbeda. Karakteristik lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016, sebagian besar

didominasi oleh lahan pertanian sebesar 241.113 Ha atau 76 persen, dimana pertanian bukan sawah masih lebih besar daripada pertanian sawah. Hal ini bisa dilihat pada table 1.1berikut ini:

Tabel 1.1. Luasan Lahan Pertanian Sawah dan Bukan Sawah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun (2014-2016)

Kab/Kota	**Lahan pertanian (Ha)**					
	Sawah			**Bukan Sawah**		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Kulonprogo	10.296	10.366	10.366	35.027	34.957	34.933
Bantul	15.191	15.225	15.150	13.639	13.639	12.923
Gunungkidul	7.865	7.865	7.875	117.701	117.437	117.332
Sleman	22.233	21.907	21.841	20.905	20.771	20.617
Yogyakarta	65	62	60	17	17	16
Total	55.650	55.425	55.292	187.289	186.821	185.821

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 total lahan pertanian adalah 241.113 Ha, dimana yang merupakan lahan pertanian sawah sebesar 55.292 dan lahan pertanian bukan sawah meliputi tegal/kebun 185,821 Ha. Artinya jumlah lahan sawah masih tertinggal jauh oleh luas lahan pertanian bukan sawah, namun berbeda hal nya dengan yang ada di Kabupaten Bantul, lahan pertanian sawah dengan luasan 15.150 ha dan lahan pertanian bukan sawah 12.923 Ha jauh lebih besar lahan sawah sebesar 2.227 Ha dan jika dibandingkan Kabupaten lain yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Bantul memiliki lahan pertanian yang lebih luas jika di bandingkan dengan lahan bukan petanian, hal ini dapat dilihat pada table 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2. Luasan Lahan Sawah, Lahan Bukan Sawah, Lahan Bukan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2016

kategori	Luas lahan (Ha)	Persentase (%)
lahan sawah	15.150	30.09
lahan bukan sawah	12.923	25.67
lahan bukan pertanian	22.268	44.23
Jumlah	50.341	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa lahan pertanian memiliki persentase lebih besar dibandingkan dengan lahan bukan pertanian, total persentase lahan pertanian (lahan sawah dan lahan bukan sawah meliputi tegal/kebun) adalah sebesar 55,76 persen dimana 30,09 persennya adalah lahan sawah.

Trimulyo adalah desa yang berada di Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Trimulyo merupakan desa yang sudah menerapkan sistem *Corporate Farming* dalam mengelola lahan pertanian berkerjasama antara Kelompok Tani Barokah Blawong I dengan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada dan Bank Indonesia, kegiatan tersebut didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kodam IV Diponegoro.

Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Barokah di Desa Trimulyo, melakukan panen perdana demplot atau lahan percontohan padi. Panen dilakukan di lahan seluas enam hektare. Lahan ini dimiliki oleh sekitar 77 masyarakat petani dan pemilik lahan yang digarap oleh tim teknis secara konsolidasi.

Hasil panen dikelola secara bersama untuk dipasarkan. Secara ekonomi, sistem *Corporate Farming* ini memberi keuntungan berupa efisiensi biaya dan proses produksi. Selain itu, juga meningkatkan produktivitas pertanian, pendapatan dan kesejahteraan petani.

Pembinaan usahatani melalui pertanian berkoperasi tidak lain adalah sebagai upaya percepatan sarana. Petani yang banyak jumlahnya dan tersebar di pedesaan yang luas, sehingga dalam pembinaan kelompok diharapkan timbulnya niat dan wawasan kebersamaan memecahkan dan merubah citra usahatani.

Corporate Farming di Kabupaten Bantul merupakan pertama kali dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Corporate Farming* yang digelar oleh Bank Indonesia (BI) berhasil meningkatkan hasil panen padi milik petani. Hasil awal sebelum dilaksanakannya program *Corporate Farming* sebesar 3,5 ton per Ha, setelah dilaksanakannya program *Corporate Farming* hasil lahan pertanian tersebut mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 7,7 ton per Ha. Keunggulan program *Corporate Farming* adalah hasil produksi yang lebih besar, biaya produksi berkurang sebesar 50% dan efisiensi benih yang awalnya 25 kg per Ha setelah dilaksanakannya program *Corporate Farming* benih yang dibutuhkan adalah 15 kg per Ha. Kelemahan dari program *Corporate Farming* adalah mindset petani belum terbangun karena program *Coporate Farming* ini dikelola secara modern, adanya keterbatasan pengetahuan dalam konsep pengelolaan secara bersama-sama, kendala sisi produksi, keterampilan petani yang masih belum memadai, lemahnya kelembagaan petani, tempat pemasaran dan belum ada SOP dari pra tanam hingga pasca panen. (https://www.starjogja.com/2019/05/03/corporate-farming-di-bantul/)

Berdasarkan keterangan dari Kepala tim pengembangan ekonomi BI Jogja Bapak Probo Sukesi di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian "**Respon Petani Corporate Farming di Dusun Blawong I, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul**"

B. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok dari penelitian ini adalah petani di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bahwa luasan lahan yang awalnya bepetak-petak dikelola secara berkonsolidasi dengan menyatukan semua lahan melalui

program *Corporate Farming*, hal tersebut tidaklah mudah bagi sebagian petaniuntuk mengubah pola pikirnya dimana pada awalnya para petani mengelola lahan pertaniannya secara individu, dan juga mindset sebagian petani belum terbangun karena program *Corporate Farming* dikelola secara modern, adanya keterbatasan pengetahuan dalam konsep pengelolaan secara bersama-sama, kendala produksi, kendala mekanisasi, keterampilan petani belum memadai, lemahnya kelembagaan petani, tempat pemasaran dan belum ada SOP baik dari pra tanam hingga pasca panen.

Lima kabupaten yang ada di Yogyakarta, baru satu Kabupaten yang yang dipilih untuk melaksanakan program *Corporate Farming* yaitu Kabupaten Bantul, oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui respon petani terhadap program *Corporate Farming*.

Berdasarkan uraian di atas perumusan masalah yang ditelaah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksaan program *Corporate Farming* di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul?
2. Bagaimanakah respon petani terhadap pelaksanaan program *Corporate Farming* di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji pelaksanaan program *Corporate Farming* di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul.
2. Mengkaji respon petani terhadap Program *Corporate Farming* di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul.

D. Kegunaan Penelitian

Penilitian ini berguna sebagai:

1. Sumbangan informasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan program *Corporate Farming* sehingga pemerintah dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok tani terkait program *Corporate Farming*.

2. Bagi aparat penyuluh pendamping, penelitian ini dapat menjadi sumbangan referensi pengembangan ide usaha agribisnis yang potensial dilakukan di Kabupaten Bantul.
3. Bagi petani, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai pelaksanaan program *Coporate Farming* di Kabupaten Bantul.
4. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sumber informasi dalam melakukan penelitian sejenis ataupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
5. Bagi peneliti, Penelitian bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pengetahuan penulis sekaligus untuk memenuhi syarat perkuliahan.